

SKRIPSI

**POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPENGURUSAN
PARTAI Keadilan Sejahtera
STUDI DPD PARTAI PKS KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Guna untuk memperoleh sarjana strata satu (SI)



Disusun Oleh :

Bq. Vera Ananda Putri

Nim : 216130095

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAM ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019/2020

HALAMAN PERSETUJUAN
POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPENGURUSAN
PARTAI Keadilan Sejahtera
STUDI DPD PARTAI PKS KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Disusun dan diajukan oleh:

Bq. Vera Ananda Putri
NIM. 216130095

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

Pembimbing II

Ayatullah Hadi, S.IP., MIP
NDIN. 0816057902

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., MIP
NDIN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

**POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPENGURUSAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
STUDI DPD PARTAI PKS KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Disusun dan diajukan oleh:

Bq. Vera Ananda Putri

NIM. 216130095

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian Skripsi pada tanggal: 5 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji:

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** (PU)
NIDN. 0008075914
2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP** (PP)
NIDN. 0816057902
3. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si** (PN)
NIDN. 0825038303

**Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan**

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN. 0806066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BQ. VERA ANANDA PUTRI
NIM : 216130095
Tempat/Tgl Lahir : JOR. - 27 - DESEMBER - 1997
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 087800156694
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

POKTIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPENGURUSAN PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA (STUDI DPD PKS KABUPATEN LOMBOK
TIMUR)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 28-02-2020

Penulis



NIM. 216130095

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bq. Vera Ananda putri

NIM : 216130095

Program studi : Studi Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Mataram

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang diacu dalam naskah ini dan disebut daftar pustaka.

Mataram, 5 Februari 2020



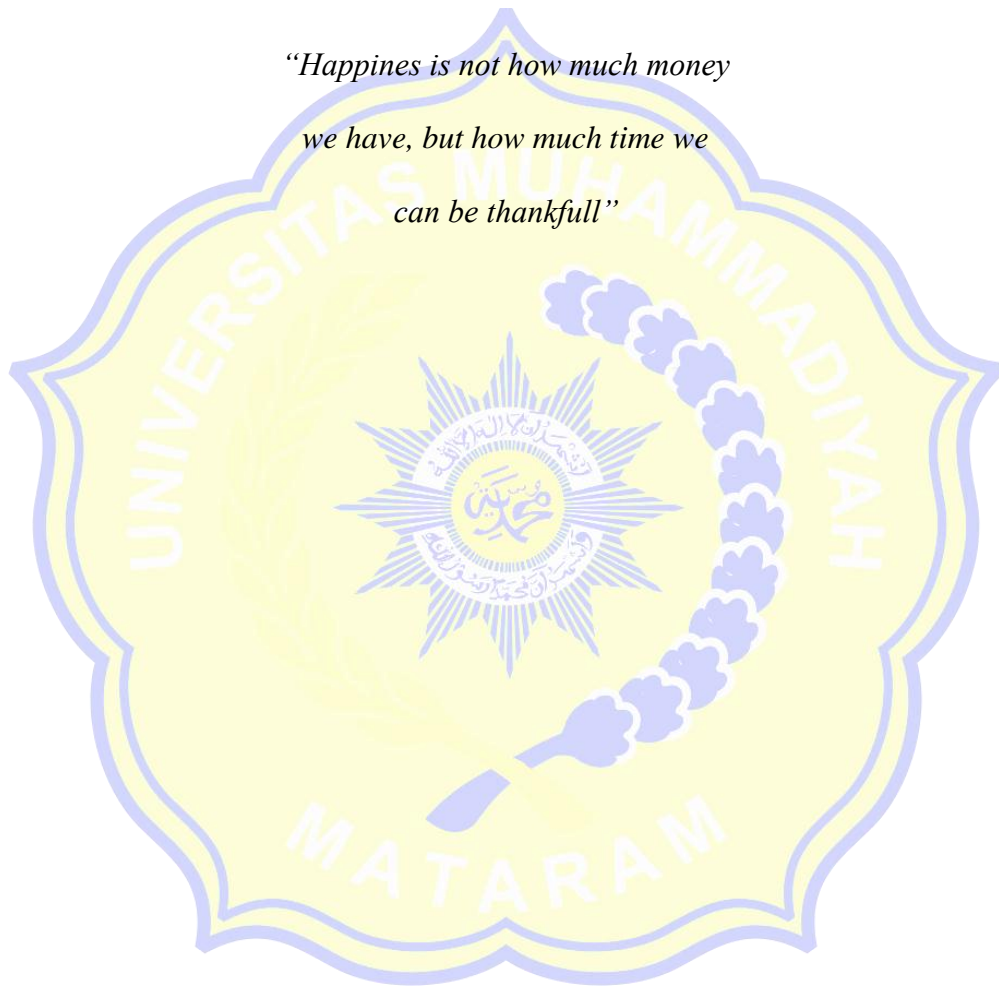
Bq. Vera Ananda Putri
NIM. 216130095

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah, 6:8)

*“Happines is not how much money
we have, but how much time we
can be thankful”*



PERSEMBAHAN

Puji syukurku sembahkan kepada Allah Azza Wa Jalla, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya ini.

Sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang teguh dengan Sunnahnya.

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Lalu Maskan Mawalli, S.Sos (Abah) dan Kartini Maskan (Mama), syukur dan terimakasih yang tak terhingga atas segala hal yang tak ternilai, tak henti untuk menyemangatiku. Ini adalah penggenapan janjiku. Hanya kepada Allah kiranya aku memohon untuk dapat membalas semua jerih payah dan kasih sayangmu. Untuk Abah dan Mama tercinta yang tak pernah berakhir dariku.
2. Kedua saudaraku, Lalu Wira Azhari Imran (kakak) dan Lalu Kuku Gagah Pandite Mutawalli (adik), selalu menjadi pendorong semangatku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur”*** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir (skripsi) pada Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Drs. H. Darmansyah., M.Si selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan
5. Bapak Ayatullah Hadi S.IP, M.IP selaku pembimbing kedua, terimakasih atas bimbingannya yang penuh sabar dan teliti.

6. Segenap dosen pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak Murnan, S.Pd selaku Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan izin penulis melaksanakan penelitian.
8. Bapak Lukman Taufiq, Bapak Mulyadi, serta pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan informasi dan membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk Abahku Lalu. Maskan Mawalli., S.Sos dan Mamaku Kartini Maskan, terima kasih atas do'a, dukungan dan dorongan semangat selama ini dan lebih khususnya ketika penulis menyusun skripsi ini.
10. Untuk kakakku Lalu Wira Azhari Imran dan adikku Lalu Kukuh Gagah Pandite Mutawalli, terima kasih atas do'a, dorongan dan semangat kalian selama ini.
11. Semeton batakku Arfiatun, Nurma Hidayatul Hasanah dan Cusmiati yang selalu memberikan dukungan dan semangat
12. Untuk teman tim sukses ku, Dini Mirya Mugitri, Wawan Irawan dan Muhammad Satriawan, yang telah sama-sama berjuang dalam suka, duka, lelah, letihnya selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN ku terimakasih atas waktu 45 hari bersama.
14. Teman-teman sejurusan Ilmu Pemerintahanku yang dengan kebersamaannya selama kurang lebih tiga tahun setengah mewarnai

kehidupan dikelas C Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

15. Buat teman-teman satu bimbinganku yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 30 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH iv	
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Politik Kekerabatan.....	15

1. Tipe Politik Kekerabatan.....	16
2. Sistem Kekerabatan	16
C. Patron Klien	18
D. Meryt System dan Spoil System	22
1. Merit System	22
2. Spoil System	24
E. Partai Politik	25
F. Partai Keadilan Sejahtera	28
1. Visi Partai Keadilan Sejahtera	30
2. Misi Partai Keadilan Sejahtera	31
3. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera	32
G. Kerangka Berfikir	34
H. Definisi Konseptual	34
I. Definisi Oprasional	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	39
D. Sumber Data Penelitian	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Penentuan Responden	42
G. Metode Analisis Data	43

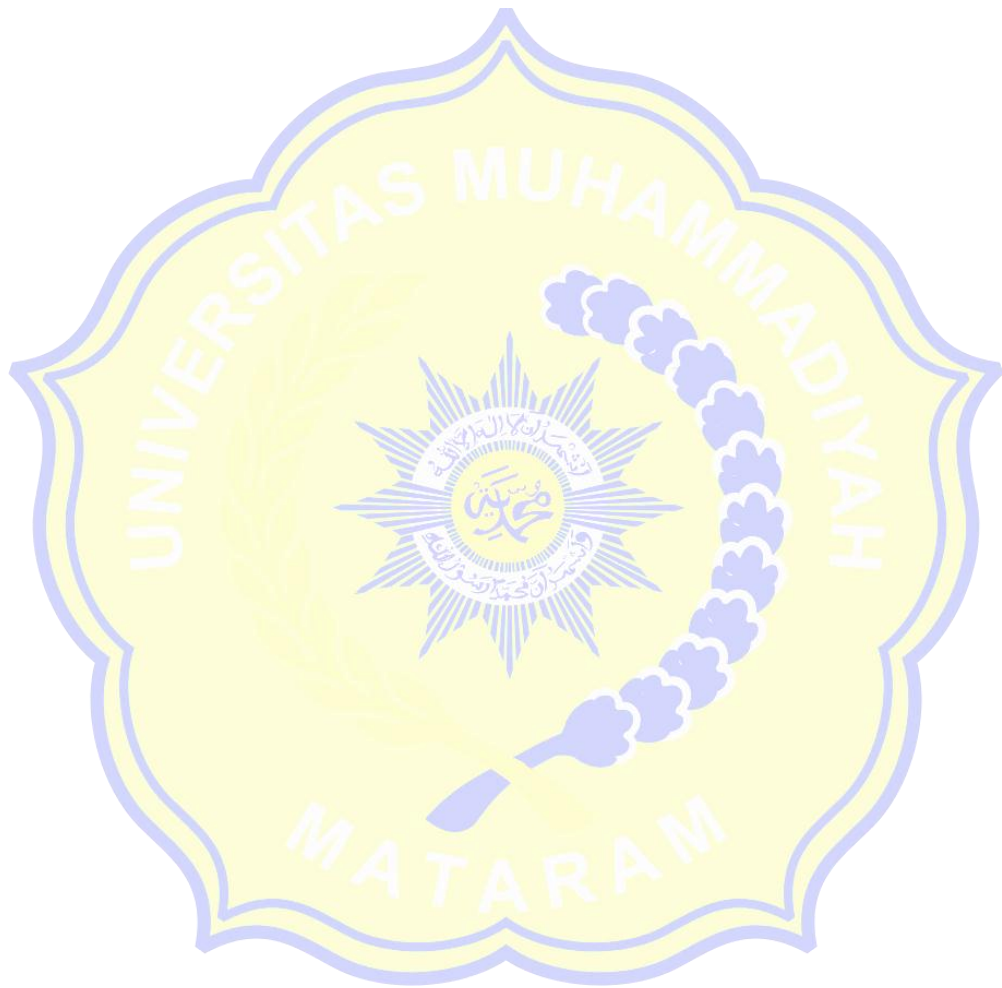
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Tinjauan Umum	45
2. Visi dan Misi DPD PKS Lotim	46
3. Program Kerja	48
4. Nama dan Lambang Partai	50
5. Struktur Organisasi	52
6. Sarana dan Prasarana	54
B. Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Pengurus PKS DPD Kab. Lotim ..	55
1. <i>Exchange Relationship</i>	55
a. Imbalan	55
b. Penghargaan	57
c. Kepatuhan	60
2. Patron Klien	63
a. Ketidak Seimbangan Status	63
b. Utang Budi Politik	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

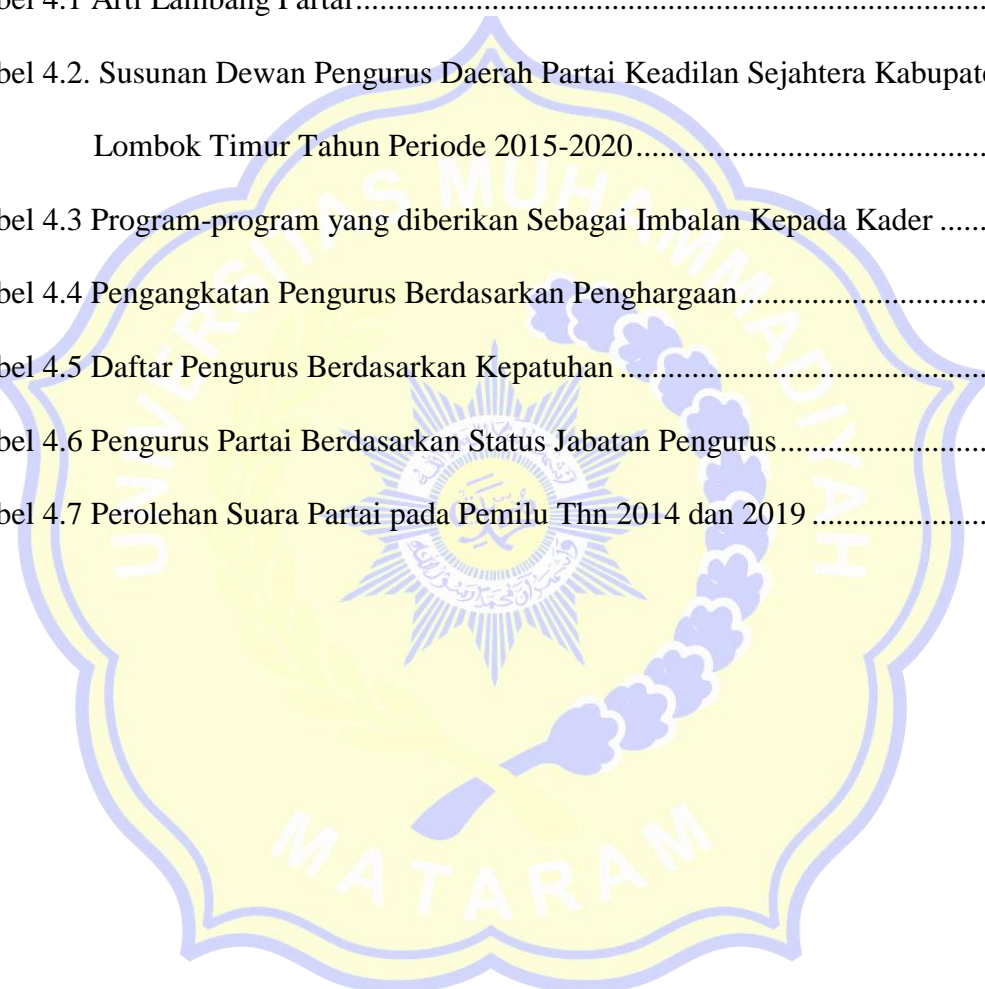
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Partai Keadilan Sejahtera51



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1. Penentuan Responden	42
Tabel 4.1 Arti Lambang Partai.....	51
Tabel 4.2. Susunan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur Tahun Periode 2015-2020.....	53
Tabel 4.3 Program-program yang diberikan Sebagai Imbalan Kepada Kader	56
Tabel 4.4 Pengangkatan Pengurus Berdasarkan Penghargaan.....	58
Tabel 4.5 Daftar Pengurus Berdasarkan Kepatuhan	61
Tabel 4.6 Pengurus Partai Berdasarkan Status Jabatan Pengurus.....	64
Tabel 4.7 Perolehan Suara Partai pada Pemilu Thn 2014 dan 2019	70



**POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPENGURUSAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PENGURUS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015-2020**

Oleh

Bq. Vera Ananda Putri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pemilihan pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur tahun 2015-2020 menghasilkan perekrutan terhadap anggota keluarga, dan para anggota yang tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menjadi pengurus partai berdasarkan AD/ART Partai Keadilan Sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya politik kekerabatan yang terjadi didalam pemilihan pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur tersebut dilihat dari teori yang digunakan, *Exchange Relationship*, yaitu imbalan, penghargaan, dan kepatuhan serta Patron-Klien, yaitu ketidak seimbangan status dan utang budi politik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para anggota diusulkan untuk menjadi pengurus partai berdasarkan suatu imbalan, penghargaan serta kepatuhannya. Sedangkan yang mendasari terjadinya politik kekerabatan dalam pemilihan pengurus itu adalah ketidak seimbangan status dimana para pengurus lebih memilih anggota keluarga sebagai pengisi jabatan-jabatan lainnya dalam kepengurusan partai, pengusulan anggota menjadi pengurus juga didukung oleh status sosial perekonomian para anggota.

KATA KUNCI: Politik kekerabatan, pemilihan pengurus partai

**KINSHIP POLITICS BLACKBALLS MANAGEMENT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
REGENCY REGION GOVERNING BOARD YEARS
EAST LOMBOK 2015-2020**

By

Bq. Vera Ananda Putri

Faculty of social and political sciences, Muhammadiyah university Mataram

ABSTRACT

The election of the executive board result in the recruitment of family members, and members who do not comply with the criteria and requirement for being party administrators base on the AD/ART pks. The purpose of this study was to find out how the kinship politics in the election of the managemen were seen from the theory used, the exchange relationship, namely rewards, rewards and obedience as well as client patron, namely the imbalance of status and political debt. This research use descriptive qualitative research type with data collection using interview and dokumentation techniques, the result of the study showed that members were proposed to become party administrators based on a reward, appretation and compliance, while underlying the occurrence of khinship politics in the election of the executive board is an imbalance of status in which the managemen prefers family members to fill other positions in the partys decision, proposing members to become administrators is also supported by the socioeconomic status of the members.

Keyword: *politics of kinship, and election for party management*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 menetapkan bahwa, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, maka di Indonesia dibentuklah sistem perwakilan politik sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia harus mengakui dan menghormati adanya Hak Asasi Manusia (HAM), artinya Indonesia harus mengakui hak-hak warga negara, antara lain; hak untuk berkumpul, mendirikan perserikatan, menyatakan pendapat dan pemikirannya, perkumpulan dan perserikatan dapat dilihat dari adanya organisasi kemasyarakatan, serikat kerja, LSM dan partai politik.

Di dalam sistem demokrasi perwakilan, keberadaan partai politik menjadi *condition sine qua non* bagi bekerjanya mekanisme demokrasi. Sebagai pengorganisasian warganegara yang memiliki cita-cita politik yang sama dan bertujuan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan negara serta mengisi posisi-posisi politik di semua tingkatan, partai politik merupakan *the backbone of democracy*.

Dewasa ini istilah politik dan partai politik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo,2008:15).

Menurut Undang-Undang nomer 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomer 2 tahun 2008 tentang partai politik, adalah sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Saat ini politik kekerabatan tengah menjadi *tren* diberbagai daerah di Indonesia. Praktik semacam ini harus segera dihentikan. Bukan hanya bertentangan dengan semangat hakiki demokrasi, namun praktik politik kekerabatan ini berpotensi kuat menutup peluang masyarakat menjadi pemimpin ataupun kepengurusan partai. Jika berbicara mengenai politik kekerabatan (politik dinasti) sebenarnya telah ada dan telah berkembang di Indonesia pada zaman kepemimpinan Soekarno dilanjutkan oleh putrinya sekaligus mantan presiden yaitu Megawati Soekarno Putri yang diturunkan lagi kepada putrinya Puan Maharani.

Politik kekerabatan memang dapat dijumpai di hampir semua negara. Di Amerika Serikat misalnya, keluarga Kennedy masih dianggap sebagai kekuatan politik berpengaruh atau dihormati, baik di Massachusset maupun ditingkat negara federal. Demikian pula dengan keluarga Tafts dan Daley di Ohio dan Chicago. Saat ini Menlu Amerika, Hillary Clinton adalah istri dari mantan presiden Bill Clinton. Meski keluarga-keluarga ini memiliki pengaruh,

prestise, atau kekuatan finansial, prinsip *equality of opportunity* benar-benar dihormati dan dijalankan sehingga kemunculan dari tokoh-tokoh dari keluarga politik ini tidak menimbulkan resistensi yang luas dikalangan pemilih yang rasional di Amerika.

Di Indonesia, politik kekerabatan identik dengan pemusatan kekuasaan di keluarga atau kerabat politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jika kecendrungan ini makin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik Indonesia akan seperti yang terjadi di Filipina, dimana Bossism berbasis teritorial menguasai politik. Negara dijalankan oleh segelintir elit dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial.

Berkembangnya politik kekerabatan di Indonesia pada masa saat ini sungguh merupakan suatu kecendrungan yang perlu diperlambat bahkan jika mungkin diakhiri. Dengan bertumbuhnya politik kekerabatan, maka peluang juga akan semakin terbuka untuk melakukan dinasti politik dan juga akan berpengaruh terhadap kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, maupun kontrol ekonomi yang nantinya akan memenangkan kontestasi politik dibandingkan yang lain yang sumber dayanya masih terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan harapan.

Akar terbentuknya politik kekerabatan adalah adanya budaya politik patrimonialisme, dan tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik.

Dalam praktiknya budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan.

Bentuk patrimonial di Indonesia berkembang pada era Kepemimpinan Presiden Soeharto dimana hal tersebut bermula dari kultur Asal Bapak Senang pada kala itu, sifat birokrasi yang bercirikan patron-klien melahirkan tipe birokrasi patrimonial, yakni suatu birokrasi dimana hubungan-hubungan yang ada, baik internal maupun eksternal, adalah hubungan antar patron dan klien yang sifatnya sangat pribadi dan khas.

Menguatnya politik kekerabatan juga merupakan suatu indikasi dari memburuknya institusional kepartaian pada umumnya, dan melemahnya kemampuan kepengurusan, pengrekrutan dan kaderisasi partai politik pada khususnya.

Sementara itu, masalah kepartaian semakin kompleks karena budaya dan mekanisme tidak dijalankan secara konsekuen. Dalam pengambilan keputusan, seringkali mekanisme demokrasi tidak berjalan karena kuatnya peran pimpinan maupun oligarki di partai politik.

Mengingat sebagaimana fungsi partai politik yang tercantum dalam undang-undang nomer 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomer 2

tahun 2008, salah satu fungsi dari partai politik itu adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tetapi dalam pelaksanaan rekrutmen politik itu sendiri, sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya hubungan kekeluargaan kekerabatan atau kepentingan pribadi sehingga seseorang mudah menjadi pengurus partai.

Fenomena seperti ini dikenal dengan sebutan kader karbitan atau kader titipan. Tidak jarang pula demi kepentingan, kader suatu partai pindah ke partai lain yang disebut kader loncatan.

Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya: PKS) merupakan salah satu partai besar dan memiliki massa yang cukup banyak, salah satu contohnya di tingkat Kabupaten Lombok Timur. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak dan resmi pimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur. Keberhasilan suatu partai tentunya tidak terlepas dari kerja sama dan rasa tanggung jawab bersama dari pimpinan partai, kepengurusan, kader-kader dan anggota-anggota partai.

Pada penelitian ini, penulis terfokus kepada kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera. Pada pelaksanaan Musyawarah Daerah yang diadakan pada 24 oktober 2015, yang di pimpin langsung oleh wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat, H. Patopo Adnan, melantik susunan pengurus Dewan Syuro dan Dewan Pengurus

Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Timur di Kantor DPD Kabupaten Lombok Timur. Murnan sebagai ketua terpilih DPD PKS Kabupaten Lombok Timur, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris umum dan beberapa pengurus lainnya terpilih menjadi kepengurusan partai tidak sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan pada masa jabatan tahun 2015-2020.

Sehubungan dengan hal demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang politik kekerabatan dalam pemilihan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) di Kabupaten Lombok Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana terjadinya Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di DPD Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana terjadinya Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di DPD Kabupaten Lombok Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya studi penelitian ini, diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dalam kajian tentang fenomena kekerabatan politik, memberikan alternatif informasi tentang politik kekerabatan dan sumber bagi peneliti-peneliti yang tertarik terhadap politik kekerabatan dalam partai politik. Selain itu juga diharapkan mampu menambah khazanah kepustakaan ilmu pemerintahan khususnya mengenai fenomena politik kekerabatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang politik kekerabatan, serta untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program strata 1 di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Bagi partai politik, dalam hal ini adalah Partai Keadilan Sejahtera, diharapkan dapat memberikan masukan, tambahan informasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan partai terutama yang berkaitan dengan kepengurusan partai.

3. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ilmu pemerintahan strata satu (S1) di program studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk susunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Dalam penelitian, penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya (Masyuri dan Zaenuddin, 2008: 100).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama / tahun	Judul	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Ade pupi prameswari / 2014	<i>Praktik Politik Kekerabatan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (ditinjau dari perspektif politik hukum)</i>	Politik kekerabatan yang terjadi di Kabupaten Jombang dilatar belakangi oleh beberapa motif, antara lain: motif kekuasaan, motif status dan motif bergabung. Adapun implikasi dari politik kekerabatan tersebut adalah: implikasi terhadap <i>output</i> instansi Pemerintah Daerah dibidang kesehatan, pertanian, dan kepegawaian yang merupakan instansi dibawah pimpinan trah-trah Suyanto. Serta implikasi terhadap kebijakan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah, serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini terutama menyangkut persoalan proses perekrutan di dalam birokrasi pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Bupati untuk menunjuk pemimpin instansi tersebut.	Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang politik kekerabatan, perbedaannya adalah penelitian ini menekankan pada perspektif hukum, dan meneliti di kabupaten Jombang. Sedangkan penelitian penulis lebih melihat bagaimana politik kekerabatan dalam pemilihan kepengurusan partai.

2	Catur Puguh Pamungkas, Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Social Politik Universitas Diponegoro Semarang	<i>Politik Kekerabatan di Pilkada Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E - Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015</i>	Rantai kekuasaan di Klaten memiliki pola yang cukup unik yaitu, munculnya politik kekerabatan yang melibatkan dua keluarga yang silih berganti menempati kursi kekuasaan sebagai bupati maupun wakil bupati. Adanya politik kekerabatan memberikan dampak yang cukup besar bagi pasangan Sri Hartini dan Sri Mulyani pada perolehan suara di pilkada Klaten Tahun 2015	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang politik kekerabatan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini terfokus membahas mengenai politik kekerabatan terpilihnya salah satu pasangan calon di pilkada Kabupaten Klaten tahun 2015. Sedangkan pada penelitian penulis terfokus kepada bagaimana politik kekerabatan dalam pemilihan kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera
3	Etha Pasan / 2013	<i>Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Presiden di Filipina di Tahun 2001-20011</i>	Terdapat beberapa faktor-faktor yang mendukung terjadinya politik kekerabatan di filiphina, seperti kelas sosial, patron/klien dan budaya politik parokial. Keberadaan klan-klan yang terus bertambah dan berkolaborasi dengan partai serta loyalitas klan yang tinggi semakin memperkuat posisi politik kekerabatan. Budaya parokial juga masih ada di dalam masyarakat yang cenderung apatis terhadap kehidupan politiknya sehingga mudah di mobilisasi oleh penguasa.	Kesamaan antara penelitian dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang politik kekerabatan. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah dan hanya fokus terhadap penyebab munculnya politik kekerabatan di pemilihan presiden Filipina tahun 2001-2011. Sedangkan pada penelitian penulis hanya terfokus kepada bagaimana politik kekerabatan dalam pemilihan kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera
4	Nikma Ragil Anggaraini, Ikhsan Budi Riharjo / 2017	<i>Pengaruh Politik Kekerabatan Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan</i>	Politik kekerabatan berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah dan kinerja keuangan	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang

		<i>Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi</i>	pemerintah daerah serta berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik. Pengendalian internal sebagai variable pemoderasi dapat meminimalisir dampak negative parktik politik kekerabatan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	politik kekerabatan. Sedangkan perbandinganya adalah pada penelitian ini membahas pengaruh politik kekerabatan terhadap akuntabilitas pemerintahan. Sedangkan pada penelitian penulis lebih terfokus kepada bagai politik kekerabatan dalam pemilihan kepengurusan Partai Politik Keadilan Sejahtera
5	Rajiv WindiTristana	<i>Politik Kekerabatan dalam Pemerintah Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara</i>	Kemenangan politik lama yang melibatkan elit terdahulu kepada desa membangun kekuasaan, yang berhasil dipelihara dan diperkuat oleh generasi-generasi kepala desa berikutnya dari kekerabatan tersebut	Persamaandalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang terjadinya politik kekerabatan. Perbedaandalam penelitian ini membahas fenomena politik kekerabatan dalam pemerintahan desa, sedangkan pada penelitian penulis yaitu pembahasannya lebih terfokus kepada politik kekerabatan yang terjadi dalam pemilihan kepengurusan partai politik keadilan sejahtera.

Penelitian yang dilakukan oleh Hade Pupi Prameswari pada tahun 2014.

Praktek politik kekerabatan yang dilakukan pemerintahan Jombang, penelitian ini dilihat dari perspektif hukum. Bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan, serta menganalisis mengenai praktik politik kekerabatan dalam pemerintahan daerah Kabupaten Jombang.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa politik kekerabatan yang terjadi di Kabupaten Jombang dilatar belakangi oleh beberapa motif, antara lain: motif kekuasaan, motif status dan motif bergabung. Adapun implikasi dari politik kekerabatan tersebut adalah: implikasi terhadap *output* instansi Pemerintah Daerah dibidang kesehatan, pertanian, dan kepegawaian yang merupakan instansi di bawah pimpinan trah-trah Suyanto.

Implikasi terhadap kebijakan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pelanggaran Etika Politik yang di lakukan oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini terutama menyangkut persoalan proses perekrutan di dalam birokrasi pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Bupati untuk menunjuk pemimpin instansi tersebut. Namun, ketika tidak dilandasi oleh kompetisi yang sehat dan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, maka akan terjadi banyak kebobrokan dalam tubuh instansi tersebut. Maka dari itu, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pemilu pada Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Politik Dinasti didalamnya.

Pada penelitian ke dua yang dilakukan oleh Catur Puguh Pamungkas, yaitu mengenai politik kekerabatan di pilkada Kabupaten Klaten yaitu dengan terpilihnya pasangan calon Hj. Sri Hartini dan Hj. Sri Mulyani memosisikan kerabat sebagai pemberi peran yang cukup besar dalam perolehan suaranya.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Etha Pasan pada tahun 2013, politik kekerabatan dalam pemilihan presiden di Filipina di tahun 2010-2011 tujuan dari penelitian tersebut ialah menganalisis politik kekerabatan yang berkembang di Filipina pada pemilihan presiden di tahun 2001-2011.

Hasil dari penelitian tersebut terdapat beberapa faktor-faktor yang mendukung terjadinya politik kekerabatan di Filipina, seperti kelas sosial, *patron/klien* dan budaya politik parokial. Keberadaan klain-klain yang terus bertambah dan berkolaborasi dengan partai serta loyalitas klain yang tinggi semakin memperkuat posisi politik kekerabatan.

Selanjutnya pada penelitian ke empat yang dilakukan oleh Nikma Ragil Anggraini, Ikhsan Budi Riharjo tahun 2017, yaitu tentang pengaruh politik kekerabatan terhadap akuntabilitas pemerintahan dengan pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi, dimana politik kekerabatan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian terakhir yaitu politik kekerabatan dalam pemerintahan desa, yang dilakukan oleh Rajiv Windi Triastana. Dimana kemenangan politik lama dengan melibatkan elit terdahulu dapat membangun kekuasaan yang dipelihara oleh generasi-generasi kepala desa selanjutnya dari kekerabatan itu sendiri.

2.2 Politik Kekerabatan

Politik adalah aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka (Andrew Heywood, 2013: 2).

Politik kekerabatan menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti partai politik, lembaga, dan institusi negara, serta media massa. Peralatan sistem demokrasi tersebut digunakan bukan untuk menopang sistem demokrasi melainkan memanipulasinya menjadi oligarki. Politik kekerabatan menjadi ruang perebutan kekuasaan dan penimbun kekayaan antara para oligarki. (Harjanto, 2011:138).

Politik kekerabatan kerap dinilai sebagai sesuatu yang bisa melanggengkan kekuasaan. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal dengan politik dinasti memang kerap terjadi dan bahkan terjadi disekitar kita. Jadi arti dari politik kekerabatan itu sendiri adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan (purwaningsih, 2015:10).

Politik kekerabatan semakin tampak menguat. Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik. Menguatnya

politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan jika kecendrungan ini semakin meluas. Negara dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karena sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial.

Dari konsep Caey, Hess, dan Kurt, kajian tentang politik kekerabatan lebih banyak menggunakan konsep dinasti politik, keluarga politik, maupun kekerabatan politik, namun skripsi ini menggunakan konsep politik kekerabatan. Konsep politik kekerabatan dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada aktifitas politik yang merekrut anggota kerabatnya dalam jabatan politik (Harjanto, 2011:152).

a. Tipe Politik Kekerabatan

Terdapat beberapa catatan mengenai fenomena politik kekerabatan yaitu, *pertama*; terdapat keinginan yang cukup kuat dari pertahana untuk mempertahankan kekuasaan dengan membentuk keluarga politik ditingkat lokal. *Kedua*; kecendrungan pembentukan politik kekerabatan ternyata didukung oleh partai-partai besar di lembaga perwakilan yang berarti juga memperoleh dukungan dari elit politik.

Dukungan partai-partai besar pada kandidat dari keluarga pertahana (yang bahkan bukan berasal dari kader partai) menunjukkan masih lemahnya partai politik sebagai instrumen demokrasi, yang lebih mengandalkan pada aspek popularitas kandidat (purwaningsih, 2015:2).

b. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah sistem hubungan sosial yang timbul dari keturunan dan perkawinan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Sedangkan perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Sehubungan dengan menjalankan fungsinya, sistem kekerabatan ini terlihat pada lembaga keluarga. Terdapat tiga macam bentuk keluarga, yaitu keluarga inti, keluarga besar dan keluarga poligami. Untuk kepentingan bersama, beberapa keluarga berusaha menggabungkan diri, dasarnya antara lain satu keturunan mempunyai tujuan yang sama (Warsito, 2012:167-168).

Sistem kekerabatan dalam praktik politik menurut Fortes dan Evans Prichard (Anggraini, 2013):

- Pertama, yang menunjukkan kepada masyarakat yang mempunyai kekuasaan terpusat, hirarki, administratif, lembaga hukum ditetapkan dengan jelas. Struktur, kelas dan perilaku politik menurut gambar teritorial. Struktur administratif berisikan struktur politik dan karenanya memiliki sebuah pemerintahan yang menyerupai negara. Dalam struktur kekuasaan tugas dan wewenang politik tertata dengan rapi mulai dari tingkat tertinggi sampai pada struktur kelompok yang paling kecil/ rendah.
- Kedua, adalah sistem politik dengan struktur politik yang tidak mempunyai kekuasaan terpusat, mesin administratif atau pengadilan

dengan kekuasaan untuk menjatuhkan tidak tertata dengan jelas, dimana dalam struktur politik tugas dan wewenang tidak tertata secara rapi sehingga kadang disebut masyarakat tak bernegara. Dalam masyarakat seperti ini garis keturunan dipergunakan sebagai kerangka satuan politik, sehingga perilaku politik terikat sangat kuat dengan dan tercakup oleh sistem pertalian keluarga.

- Ketiga, adalah kelompok komunitas kecil yang keseluruhannya dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan, kelompok masyarakat tersebut terbentuk berupa gerombolan keluarga atau keluarga pengembara yang hidupnya kadang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan ketersediaan makanan, baik makanan untuk kebutuhan kelompok atau kebutuhan ternak.

2.3 Patron Klien

Teori ini hadir untuk menjelaskan bahwa dalam suatu interaksi sosial masing-masing aktor melakukan hubungan timbal balik. Hubungan ini dilakukan secara vertikal (satu aktor kedudukannya lebih tinggi) maupun secara horizontal (masing-masing aktor kedudukannya sama). Istilah Patron berasal dari bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh, sedangkan Klien berarti bawahan atau orang yang diperintah yang disuruh (Usman, 2004: 132).

Patron dan Klien berasal dari suatu model hubungan sosial yang berlangsung pada zaman Romawi Kuno. Seorang *patronus* adalah bangsawan

yang memiliki sejumlah warga dari tingkat lebih rendah, yang disebut *clients*, yang berada dibawah perlindungannya. Meski para klien secara hukum adalah orang bebas, mereka tidak sepenuhnya merdeka. Mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga pelindung mereka. Ikatan antara patron dan klien mereka bangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik yang biasanya bersifat turun temurun (Pelras, 2009: 21).

Agustino (2014: 173) patron muncul sebagai individu yang memiliki kelebihan, kekayaan, atau kekuasaan, sedangkan klien hadir sebagai anggota masyarakat yang biasa yang tidak mempunyai kelebihan tersebut, sehingga hubungan tersebut dilandaskan oleh pertukaran kepentingan antar patron dan klien.

Hubungan patron dan klien didefinisikan sebagai suatu khusus spesifik dari hubungan dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental di mana individu yang mempunyai status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang di miliki untuk memberikan perlindungan ataupun manfaat kedua-duanya kepada seseorang yang kedudukannya lebih rendah (klien) yang pada gilirannya membalasnya dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan termasuk pelayanan personal kepada patron (James C. Scoot, 1972: 4).

Peter M. Blau (dalam Philipus, Aini, 2011:42) mengatakan hubungan patron-klien lebih merupakan hubungan pertukaran (*exchange relationship*) yaitu bahwa:

1. Pertukaran hanya terjadi antar pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan meraka.
2. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit.
3. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (dalam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar)
4. Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan/ penghargaan dan kepatuhan.

Selanjutnya Peter M. Blau (dalam Philipus, Aini, 2011:42) menjelaskan ciri-ciri patron-klien, sebagai berikut:

1. Adanya ketidak seimbangan status antara patron-klien.
2. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari klien.
3. Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan klien dari patron yang menyebabkan adanya rasa utang budi pada patron.
4. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan.

Menurut James Scott ada tiga sifat hubungan patron-klien:

1. Adanya ketimpangan pertukaran (*Basic inequility*) yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan dan kedudukan. Klien adalah seorang yang masuk dalam pertukaran yang tak seimbang, dimana ia tidak mampu sepenuhnya memberikan

pemberian patron, sehingga hutang kewajibannya mengikat dan bergantung kepada patron.

2. Adanya sifat tatap muka (*Face to face character*), dimana hubungan ini bersifat instrumental yakni, kedua belah pihak saling memperhitungkan utang dan rugi, meskipun demikian masih terdapat unsur rasa yang tetap berpengaruh karena kedekatan hubungan. Dengan demikian, walaupun hubungan ini bersifat instrumental, dimana kedua belah pihak memperhitungkan untung dan ruginya dari hubungan tersebut bagi mereka, namun demikian ini tidak berarti bahwa relasi yang terbentuk itu netral sama sekali. Unsur rasa masih terlibat juga di dalamnya. Adanya tahapan tatap muka dalam hubungan ini, serta terbatasnya sumber daya si patron membuat jumlah hubungan yang dapat digantikannya menjadi hubungan patronase yang terbatas.
3. Ikatan ini bersifat luwes dan meluas (*Diffuse flexibility*), sifat meluas terlihat pada tidak terbatasnya hubungan pada kegiatan kerja saja, melainkan juga hubungan tetangga. Kedekatan secara turun temurun atau persahabatan di masa lalu, selain itu terdapat pertukaran bantuan tenaga, dan kekuatan selain jenis-jenis pertukaran barang dan jasa.

(Scott dalam Hedi Sri Ahimsa Putra, 1988: 3).

Menurut Peter M. Blau sifat hubungan patron-klien adalah sebagai berikut:

1. *Asas reciprocitas*
2. *In equal*

3. Ada *force* dan *coercion*
4. Ikatan akrab atas dasar saling percaya

Perbedaan antara patronase dan klientalisme yaitu patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientalisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. (Aspinal, Sukmajati, 2015: 4).

2.4. Merit System dan Spoil System

a. Merit System

Menurut Prasowo (2008:27), merit sistem merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial (anak, keponakan, family, alumni, daerah, golongan, dan lain-lain) tetapi didasarkan pada pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan.

Dengan menggunakan merit system membuat orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha kerjasama menjadi cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sistem merit bukanlah sistem yang baru, pada awal tahun 1800, sistem sipil dari patronase telah dibentuk sebagai metode pengisian jabatan pekerjaan di pemerintahan. Dua tahun kemudian, Kongres mengeluarkan undang-undang pegawai negeri baru tahun 1882, undang-undang Pendleton yang menetapkan sistem pegawai negeri bagi karyawan federal

guna melindungi mereka terhadap kesepakatan patronase. Etika undang-undang sistem merit pertama untuk sekolah dibentuk oleh California.

Sedangkan menurut Shelmi (2009) kata merit berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jasa, manfaat serta prestasi. Merit system merupakan pembayaran imbalan (*reward*) yang dikaitkan dengan jasa atau kinerja seseorang atau manfaat yang telah diberikan karyawan kepada organisasi. Secara konsep pembayaran dengan sistem merit merupakan sistem pembayaran yang mengaitkan imbalan (*reward*) dengan kinerja karyawan. Implikasi dari konsep sistem merit adalah bahwa seseorang yang memiliki kinerja yang baik, maka akan memperoleh imbalan yang lebih tinggi begitu pula sebaliknya. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, kompetitif, seimbang dengan lingkungan, guna meningkatkan produktivitas kerja.

Pada dasarnya teori merit system diterapkan dalam birokrasi/institusi laba (yang mencari keuntungan) teori ini menitik beratkan pada penilaian kerja atau prestasi karyawan untuk menentukan *pay reward* (pembayaran prestasi kerja) akan tetapi berdasarkan perkembangannya teori merit system mulai diterapkan institusi politik/pemerintahan, dengan adanya teori ini diharapkan adanya atmosfer yang kompetitif, adil yang berdasarkan prestasi seseorang untuk mendapatkan/ ditunjuk untuk mendapatkan posisi/ jabatan dalam institusi partai politik dan pemerintahan.

b. Spoil System

Spoil system adalah mutasi didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka. Dalam institusi partai politik seharusnya hal ini tidak terjadi karena dapat menghambat kinerja dalam sebuah organisasi politik.

Dibawah ini peneliti sajikan pengertian spoil system (mutasi) menurut beberapa ahli.

Mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat, dan pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal yaitu promosi atau demosi didalam suatu organisasi (Hasibuan 2008 : 102).

Mutasi atau pemindahan merupakan suatu aktifitas rutin dari sebuah organisasi untuk melaksanakan prinsip *The Right Man in The Right Place* atau orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dengan demikian mutasi dijalankan agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih efisien (Nitisemito, 2008 : 72).

Mutasi atau perubahan adalah suatu perubahan horizontal bukan suatu kenaikan atau penurunan. Pemindahan dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jabatan yang lebih sesuai dengan keinginan dan kemampuan dengan harapan pada jabatan baru tersebut seseorang akan lebih berkembang. Pemindahan seseorang pada jabatan yang horizontal tanpa perubahan kelas pekerjaan, dilakukan agar ada penyesuaian antara kemampuan dengan tugas yang diemban sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan membuka kesempatan bagi

pegawai untuk mengembangkan kemampuannya ditempat tugas yang baru. Jadi mutasi dapat digunakan untuk pengembangan dan memperluas pengalaman kerja pegawai (Moekijat, 2009: 85).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, seharusnya pengisian jabatan dalam institusi politik tidak berdasarkan hubungan kekeluargaan, kedekatan secara emosional, kemampuan ekonomi (spoil system) tetapi lebih mengedepankan kemampuan seseorang, prestasi, penilain kerja sebagai pertimbangan dalam memilih,menentukan serta menunjuk seseorang dalam mengisi jabatan tertentu (merit system).

2.5. Partai Politik

Sebagai individu atau tepatnya sebagai suatu pribadi, manusia tidak akan bisahidup dan berkembang berdasarkan kemampuannya sendiri. Dia membutuhkan lembaga-lembaga sosial, dia membutuhkan masyarakat dan negara (Maran, 2007:7).

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang “*polis*” adalah proyek idealis Plato dan Aristoteles dalam Firmanzah (2008:48).

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, mulai banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang politik, antara lain adalah sebagai berikut :

Politik adalah aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka (Andrew Heywood, 2013: 2).

Jadi politik adalah seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, serta cara bagaimana memperoleh kekuasaan itu untuk mempengaruhi dan mengatur kehidupan orang lain yang menjadi anggota-anggotanya agar bertindak sesuai yang diperintahkannya.

Kata partai berasal dari kata “*pars*” dalam bahasa latin, yang berarti “pagian”, sedangkan dalam kamus besar bahasa inggris, kata partai adalah “*party*” berarti pihak (misalnya dalam suatu perjanjian), *even* sosial (seperti pesta), dan grup atau kelompok bersama (Hamid, 2008:4).

Berikut beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

R.H Soltau dalam bukunya *introduction to politics* berpendapat bahwa “partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.

Rusadi Kantaprawira mengatakan bahwa partai politik, yaitu organisasi manusiadimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurutpenahapan jangkadekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (Kantaprawira, 2004:63).

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan

dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun, sebagai hasil dari pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat (Hamid, 2008:9).

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008:404).

Adapun pengertian partai politik menurut Undang-Undang nomor 2 pasal 1 ayat 1 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik adalah sebagai berikut :

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”

Jadi yang disebut partai politik adalah suatu organisasi yang terorganisir dan mempunyai cita-cita, ideologi, pandangan serta tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan agar dapat memegang kontrol terhadap pemerintahan.

2.6. Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat menjadi PKS merupakan partai berasaskan islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktifitas dakwah islam semenjak awal tahun delapan puluhan. Partai dengan lambang dua bulan sabit ini merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan.

Perkembangan Lembaga Dakwah Kampus pada pengurus tinggi semakin meluas pada setiap daerah di Indonesia. Maka seiring dengan semakin tingginya tuntutan kepada Lembaga Dakwah Kampus agar tidak selalu mengkonsentrasikan geraknya kedalam kampus dan lebih memberikan kontribusi mengglobal, maka pada 14-15 Ramadhan atau 25-26 Mei 1986, diselenggarakan acara seserahan Lembaga Dakwah Kampus yang merupakan embrio dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus. Pada pertemuan FS-LDK ke 10 di Malang, Jawa Timur pada 25-29 Mei 1998, sebagian aktivis forum tersebut mengumumkan berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Paska lengsernya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, elit KAMMI mulai mempertimbangkan untuk mendirikan partai politik islam. Para kader utama KAMMI akhirnya membuat semacam survey internal untuk mengetahui opini didalam tubuh gerakan itu sendiri. Hasil survey membuktikan bahwa mayoritas aktivis KAMMI setuju untuk mendirikan partai yang kemudian diberi nama Partai Keadilan (PK). Pada tanggal 20 Juli 1998, berdiri Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di

Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail.

Pada pemilu 1999, PK tampil sebagai kekuatan politik baru yang cukup diperhitungkan. Berbeda dengan partai islam lain yang masih bergantung pada figur yang kuat, PK muncul dengan organisasi modern, transparan, dan kader-kader terpelajar. Pada pemilu pertama di era reformasi yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 1999, PK sendiri terbukti gagal memperoleh batas minimal suara sebagai syarat mengikuti pemilu selanjutnya. Ketutupan PK menjadi salah satu penyebab anjloknya suara di pemilu. Hanya meraih 1,36 persen dari total suara pemilih atau sekitar 1,4 juta pemilih dan mendapatkan urutan ketujuh.

Gagal mencapai *electoral threshold* membuat PK harus bersalin nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada April 2002, pada 2 Juli 2003 PKS menyelesaikan seluruh proses pertifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Dan Dewan Pimpinan Daerah. Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS. Penggabungan ini sekaligus menandai hak milik PK menjadi PKS. Dengan penggabungan ini maka Partai Keadilan (PK) resmi berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden PKS. Pada sidang Majelis Syuro IPKS pada 26-29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi presiden PKS periode 2005-2010. Tifatul Sembiring dipercaya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri

Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai presiden PKS. Pada sidang Majelis Syuro PKS II pada 16-20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi presiden PKS periode 2010-2015. Dan saat itu Luthfi Hasan Ishaq digantikan dengan Anis Matta karena Luthfi Hasan Ishaq tersandung kasus suap impor daging sapi dan yang terpilih menjadi presiden PKS periode 2015-2020 adalah Sohibul Iman.

Adapun landasan partai ini adalah Al-Quran yang meliputi surat Al-Syura: 13, An-Nur: 55, Al-Shaf: 10-13 dan Al-An'am: 153. Dasar pemikiran partai ini adalah Syumuliat Al-Islam (kesempurnaan Islam; Islam agama dan Negara) dengan menjadikan partai ini sebagai dakwah yang merefleksikan keseluruhan sikap, perilaku dan aktifitasnya.

a. Visi dan misi partai keadilan sejahtera

Setelah berganti nama dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera, maka visi dan misinya pun mengalami redaksi sesuai dengan dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi tidak merubah maknanya. Dan dengan visi dan misi baru ini nampaknya Partai Keadilan Sejahtera lebih bersifat nasionalisme dan akomodatif terhadap kebutuhan bangsa Indonesia secara universal.

Visi umum:

“sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa”

Visi khusus:

“partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam perwujudan masyarakat Indonesia madani”

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai:

1. Partai dakwah yang memperjuangkan islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran islam dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan cita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang Rahmatan Lil Alamin
4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

b. Misi

1. Menyebarluaskan dakwah islam dan mencetak kader-kader sebagai Anashir Taghyir.
2. Mengembangkan institusi kemasyarakatan yang islami di berbagai bidang sebagai Markaz Taghyir dan pusat solusi.
3. Membangun opini umat yang islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran islam yang solutip dan membawa rahmat.

4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinuis dalam bingkai hukum dan etika islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi silaturahmi, kerja sama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam untuk terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dan Wihdhatul-Ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezdaliman khusus terhadap negri-negri muslim yang tertindas.

c. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera

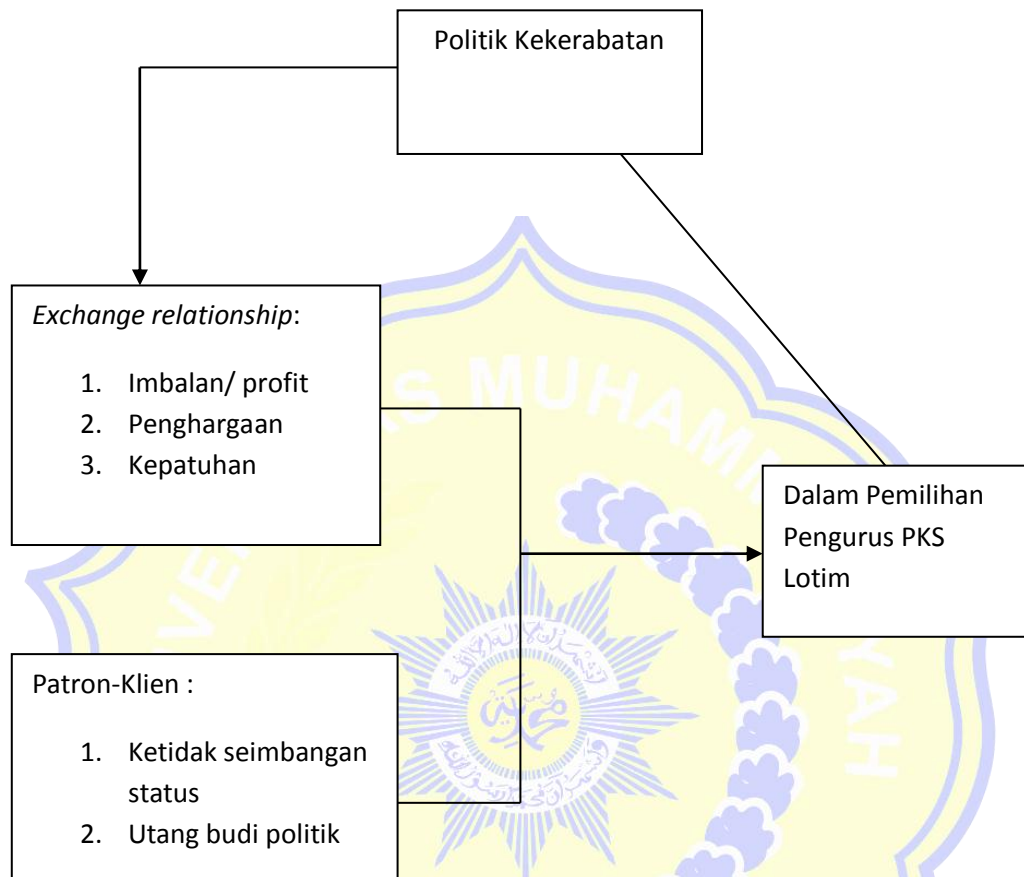
Sejak awal berdirinya, partai jaringan dakwah kampus ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai yang berideologi pancasila dan berbasis islam. Lebih dari itu, partai ini merencanakan dirinya sebagai partai dakwah, yakni partai yang mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada semua orang dan merealisasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan. Dengan kata lain, Partai Keadilanlahir untuk memperjuangan kepentingan dan kejayaan islam. Hal yang sama terjadi ketika Partai Keadilan berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2002, Partai Keadilan Sejahteramerupakan konstinuitas ideologi, pemikiran, serta Manhaj

perjuangan Partai Keadilan. Bahkan ketika telah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda islam yang lebih nyata dan artikulatif.

Dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai berdasarkan islam, partai ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional dan bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang di Ridhai Allah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai entitas nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar/ aqidah, asas dan moralitas islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermatabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus positioning Partai Keadilan Sejahtera sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Disisi lain dengan menjadikan islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka Partai Keadilan Sejahtera berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa internal subyektif aktifitas politik adalah “ibadah”, yang apabila ikhlas untuk mencari Ridho Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktifitas ini menjadi yang bernilai “amal shalih”.

2.7 Kerangka Berpikir



Sumber : Peter M. Blau (dalam philipus, Aini, 2011 : 42)

2.7 Definisi Konseptual

1. Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri dari ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya.

2. Definisi Politik Kekerabatan

Politik kekerabatan adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak

didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatan kekerabatannya (baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan).

3. Patron-Klien

Patron-klien pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individual dengan status sosio ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien).

4. Hubungan Pertukaran (*exchange relationship*)

Hubungan pertukaran adalah sesuatu yang dipertukarkan selalu mendapatkan imbalan yang sepadan.

2.8 Definisi Oprasional

a. *Exchange Relationship*

1. Imbalan/ profit

Imbalan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja para karyawan. Kompensasi dapat berupa upah per jam, hari atau gaji yang bersifat periodik.

2. Penghargaan

Penghargaan adalah suatu hasil yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individual.

3. Kepatuhan

Kepatuhan berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.

b. Patron-Klien

1. Ketidak seimbangan

Ketidak seimbangan adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan jumlah yang sama besar antara hak dan kewajiban.

2. Utang budi

Utang budi adalah suatu kebaikan, bantuan atau pertolongan yang diterima oleh seseorang, memiliki nilai dan bobot yang luar biasa besar sehingga orang yang menerima bantuan atau pertolongan tersebut merasa diselamatkan dari resiko, beban atau bahaya yang mengancam hidupnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6).

Melalui pendekatan kualitatif diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan. Dalam hal ini mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka (Moleong)

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah. Ciri-ciri umum metode deskriptif adalah memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual, serta menggambarkan fakta-fakta tentang

masalah yang diselidiki sebagaimana adanya disertai interpretasi rasional (widi, 2010:84).

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai bagaimana politik kekerabatan dalam Pemilihan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera.

3.2 Lokasi Penelitian

Penetapan penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tujuan penelitian. Purposive adalah lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan suatu pertimbangan dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan tempat dilakukannya penelitian. Secara umum ada tiga jenis penelitian berdasarkan tempatnya. Hal ini juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam metode pelaksanaan penelitian. (widi, 2010: 52-53).

1. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang hampir semua aktifitasnya dilakukan di perpustakaan.
3. Penelitian laboratorium (*laboratory research*) banyak berhubungan dengan penelitian bidang eksakta (*sains* dan rekayasa).

Dilihat dari penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan untuk melengkapi data. Pada penelitian ini lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang dijadikan sasaran dalam proses pengambilan data. Lokasi terkait adalah Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Daerah Partai

Keadilan Sejahtera yang berlokasi di Jl. Diponegoro, Kembang Sari, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83618.

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, dan referensi. Fokus penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti dilapangan. (Sugiyono, 2014: 290).

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana terjadinya politik kekerabatan dalam pemilihan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera.

3.4 Sumber Data Penelitian

Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti yaitu data yang sebenarnya sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data (Sugiyono, 2013: 2).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer dapat disebut juga data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2010:1570).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu. Sumber data yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan surat kabar yang terkait dengan materi, politik kekerabatan, partai politik, kepengurusan partai, Partai Keadilan Sejahtera, AD/ART PKS, SK-SK PKS, serta arsip dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh peneliti itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Moleong (2010:9) mengenai karakteristik penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan berbagai pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010:186).

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2010:190-191) metode wawancara memiliki bentuk, diantaranya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam, dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan aebiter. Wawancara semacam ini digunakan untuk memukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Pertanyaannya biasa tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan cirri yang unik dari informan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, prasati, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa dokumen seperti data kepengurusan PKS Kabupaten Lombok timur.

3.6 Metode Penentuan Responden

Dalam penentuan responden pada penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, teknik pemilihan informan yang sesuai dengan keinginan peneliti karena sudah tahu tentang bagaimana letak tempat ataupun lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif terdapat informan, yaitu orang yang dapat memberikan gambaran, pemahaman tentang objek penelitian (Sugiyono 2012:218). Adapun informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan ketua bidang kaderisasi.
2. Informan biasa, adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu anggota-anggota partai.

Tabel 3.1. Penentuan Responden

Nama	Jabatan
Murnan, S.Pd	Ketua Umum
Lalu Wildan Zikrullah, MA	Wakil Ketua Umum
Lukman Taufiq SP	Sekretaris Umum
Mulyadi	Ketua Bidang Kaderisasi
Muhammad Nasrudin	Anggota
Muhammad Ikhsan	Anggota
H. Usmar Iwan Surambian	Anggota

3.7 Metode Analisis Data

Dikemukakan Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, peragaan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk lebih jelasnya yaitu:

1. Reduksi data, yakni data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan, pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya kemudian disusun secara sistematis. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan haisl penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti.

2. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yakni untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dapat dituangkan dalam berbagai macam matriks, grafik jaringan dan bagan atau bisa pula dalam bentuk naratif saja.

Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskripsi. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk menggambarkan kejadian dilapangan.

3. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menganalisa data dengan menguji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna

dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.

